

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan yuridis perlindungan anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan bagaimana kesesuaian putusan pembedaan dalam perkara Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual dalam perspektif hukum pidana Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang SPPA, dimana terbagi dalam 2 (dua) bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 66. Perlindungan hukum yang bersifat represif terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual secara represif meliputi perlindungan hukum sebelum Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU, perlindungan hukum setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada JPU, perlindungan hukum setelah JPU membuat surat pelimpahan perkara ke Pengadilan, dan perlindungan hukum setelah Hakim Pengadilan memutus perkara. Selain itu penjatuhan pembedaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Slg berupa penjara selama 4 tahun dan 6 bulan serta menjalani latihan kerja selama 4 bulan di Rumah Perlindungan Sosial di Sampang tidak sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang SPPA. Majelis Hakim telah mengesampingkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Sampang sehingga asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terimplemtasikan secara nyata dalam memberikan penjatuhan pembedaan kepada Anak YAP.

Kata kunci: Perlindungan anak pelaku, kejahatan seksual, hukum pidana Indonesia

ABSTRACT

The research examines a juridical review of the protection of child sex offenders from the perspective of Indonesian criminal law. The purpose of this study is to analyze how the legal protection for children who commit sexual crimes is in the perspective of Indonesian criminal law and how the suitability of the sentencing decision in case Number: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg with the principle of the best interests of the child. This research method uses normative legal research. The results of this research explain that legal protection for children who are perpetrators of sexual crimes in the perspective of Indonesian criminal law contained in the Children Protection Act and the SPPA Law, which is divided into 2 (two) forms of protection, namely preventive legal protection, namely Article 54 paragraph (1) and paragraph (2), Article 59 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 66 of the Child Protection Act. Repressive legal protection is contained in Article 21 of the Child Protection Act. The forms of repressive legal protection for children who commit sexual crimes include legal protection before the investigator submits the case file to the prosecutor, legal protection after the investigator submits the case file to the prosecutor, legal protection after the prosecutor makes a letter of delegating the case to the court, and legal protection after the court judge decides the case. In addition, the sentencing in the Sampang District Court Decision Number: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Slg in the form of imprisonment for four years and six months and undergoing work training for four months at the Social Protection House in Sampang is not under the principle of interest for children as referred to in Article 2 letter d of the SPPA Law. The Panel of Judges has reported the results of research from the Sampang BAPAS Community Advisor so that the best interests principle of the children has not been fully implemented in real terms in the imposition of a YAP Child.

Keywords: Child protection, sexual crimes, criminal law Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1 Kerangka Teori	8
1.5.2 Kerangka Konsep.....	15
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Jenis Penelitian	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	17

1.6.3 Sumber Bahan Hukum	18
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum	19
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	20
1.7 Sistematika Penulisan	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Pengertian Anak.....	21
2.2 Ruang Lingkup Kejahatan Seksual.....	25
2.3 Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	29
2.3.1 Konsep Keadilan Restoratif	29
2.3.2 Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	31
2.3.2 Tujuan Pemidanaan terhadap Anak	33
2.3.3 Konsep Individualisasi Pidana dalam Pemidanaan terhadap Anak	35
2.4 Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	37
2.4.1 Sistem Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	37
2.4.2 Macam-macam Alat Bukti dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	41
2.4.3 Fakta Persidangan	43
2.5 Pertimbangan Hakim	44
2.5.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis.....	44
2.5.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Nonyuridis	46
2.6. Putusan Hakim.....	48

2.6.1 Pengertian dan Bentuk Putusan Pengadilan.....	48
2.6.2 Syarat Putusan Pengadilan.....	51
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia	53
3.2 Putusan Pemidanaan Perkara Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Spg dikaitkan dengan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	77
BAB IV : PENUTUP.....	95
4.1 Kesimpulan	95
4.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101